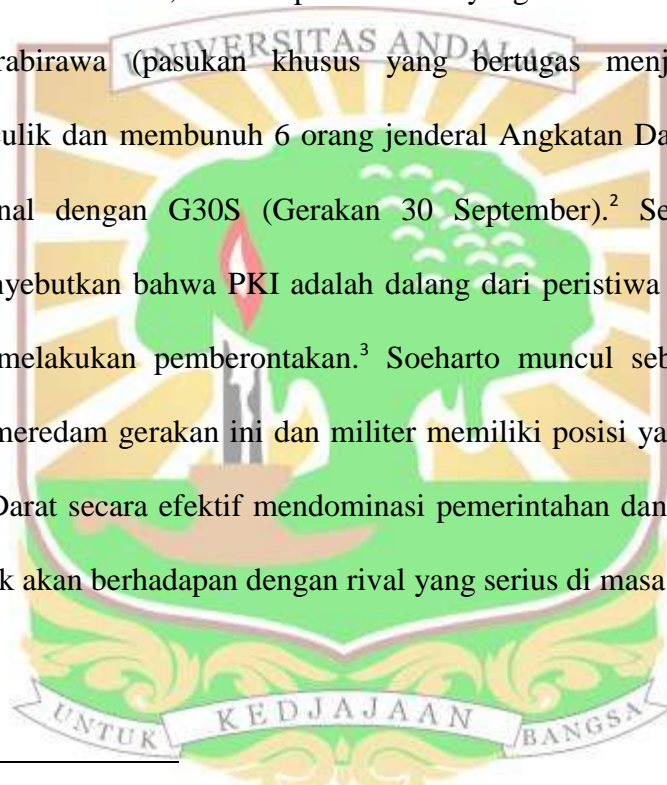


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 30 September 1965, sekelompok tentara –yang kemudian diketahui berasal dari unit Cakrabirawa (pasukan khusus yang bertugas menjaga keselamatan presiden), menculik dan membunuh 6 orang jenderal Angkatan Darat.¹ Peristiwa ini kemudian dikenal dengan G30S (Gerakan 30 September).² Sejarah resmi dari pemerintah menyebutkan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini sebagai usaha mereka untuk melakukan pemberontakan.³ Soeharto muncul sebagai tokoh yang berhasil untuk meredam gerakan ini dan militer memiliki posisi yang kuat. Soeharto dan Angkatan Darat secara efektif mendominasi pemerintahan dan politik Indonesia dan mereka tidak akan berhadapan dengan rival yang serius di masa depan.⁴



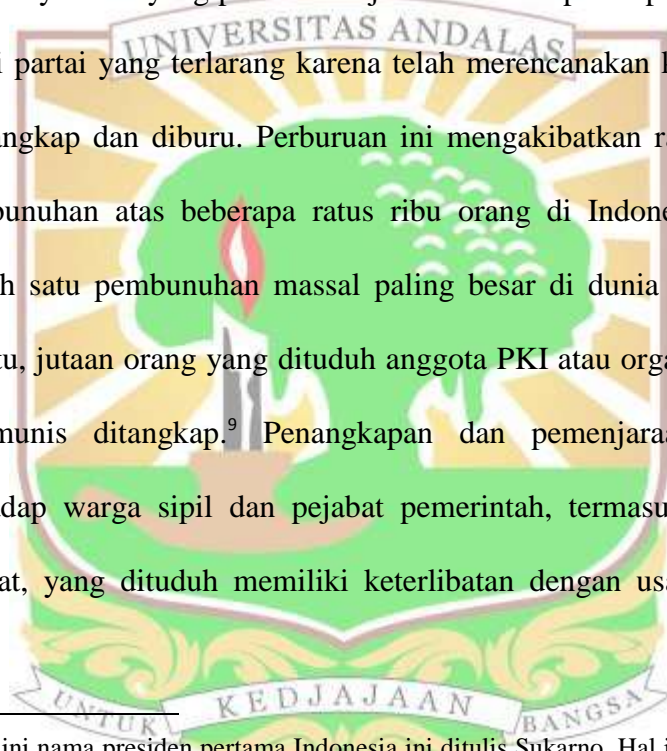
¹ Jendral yang diculik itu adalah; Ahmad Yani; R.Suprpto, M.T. Haryono; S. Parman; D.I. Pandjaitan; dan Sutoyo Siswomiharjo. Pada awalnya, gerakan ini menargetkan tujuh orang jenderal, namun dalam operasinya A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri dan para penculik salah mengira ajudan pribadinya Pierre Tandean sebagai Jenderal.

² Selain G30S, terdapat berbagai istilah untuk merujuk peristiwa ini, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) dan Gestok (Gerakan September Tiga Puluh).

³ Beberapa karya yang telah ada mengenai tema ini adalah seperti *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, *GERAKAN 30 SEPTEMBER, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (Jakarta, 1994) dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, *GERAKAN 30 SEPTEMBER Partai Komunis Indonesia* (Jakarta, 1978)

⁴ Harold Crouch, "The Indonesian Army in Politics:1960-1971", (*PhD thesis*, Monash University; 1975), hal. 177.

Lewat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 11 Maret 1966 Sukarno⁵ menyerahkan semua kekuasaan eksekutif kepada Soeharto dan pada bulan Maret 1967, Sukarno kemudian dibebastugaskan.⁶ Soeharto dilantik sebagai presiden menggantikan Sukarno. Pada tahap inilah dimulai periodisasi sejarah Orde Baru dalam sejarah Indonesia. Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu turun dari jabatannya. PKI yang pernah menjadi salah satu partai politik terkuat pada saat itu menjadi partai yang terlarang karena telah merencanakan kudeta.⁷ Anggota-anggotanya ditangkap dan diburu. Perburuan ini mengakibatkan ratusan ribu orang terbunuh. Pembunuhan atas beberapa ratus ribu orang di Indonesia setelah 1965 merupakan salah satu pembunuhan massal paling besar di dunia pada abad kedua puluh.⁸ Selain itu, jutaan orang yang dituduh anggota PKI atau organisasi seapas dan simpatisan komunis ditangkap.⁹ Penangkapan dan pemenjaraan besar-besaran dilakukan terhadap warga sipil dan pejabat pemerintah, termasuk militer dengan berbagai pangkat, yang dituduh memiliki keterlibatan dengan usaha kudeta 1965,



⁵ Dalam tesis ini nama presiden pertama Indonesia ini ditulis Sukarno. Hal ini adalah permintaan langsung dari beliau. Seperti kutipan berikut; “Setelah Indonesia merdeka aku (Sukarno) memerintahkan semua “OE” ditulis kembali menjadi “U”, Nama Soekarno sekarang ditulis menjadi Sukarno.” Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, (Jakarta; Yayasan Bung Karno, 2011), Hal 32

⁶ Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI; Asal-Usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi stabilitas dan Pembangunan*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal 104

⁷ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008a), hal 5

⁸ Robert Cribb, “Problems in the Historiography of the Killings in Indonesia,” in *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*, ed. oleh Robert Cribb (Victoria: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990), hal. 12.

⁹ Menurut pemerintah terdapat 1.5 sampai 1.7 juta orang yang dianggap sebagai komunis ditahan. Lihat *Ibid*, hal. 5.

berafiliasi dengan PKI, dan yang menunjukkan simpati.¹⁰ Mereka ini menjadi tahanan politik, istilah yang secara umum berlaku untuk sekitar 700.000 orang yang ditahan setelah Oktober 1965 atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta Gestapu tahun 1965.¹¹

Pada 1970-an, puluhan ribu tahanan politik telah dilepaskan. Namun, waktu telah mengubah keadaan dan kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Selama sekitar tiga dekade, pemerintahan Orde Baru memulai serangkaian kebijakan dan praktek membatasi semua aspek kehidupan para eks tahanan politik ini.¹² Pemerintah bisa saja menolak lamaran pekerjaan atau memecat seseorang yang ternyata hanya memiliki sanak saudara tapol atau eks-tapol. Pemerintah juga bisa menginterogasi pegawai negeri dalam *screening* mental-ideologi, lalu membagi mereka dalam klasifikasi bersih dan tidak bersih. Mereka yang termasuk dalam kelompok tidak bersih bisa saja diberhentikan dari pekerjaannya. Pemerintah masih sangat hati-hati atas potensi untuk kembali menyebarnya paham komunis.¹³ Untuk itu, Orde Baru perlu merumuskan kebijakan untuk melakukan kontrol terhadap para eks tahanan politik yang telah dibebaskan tersebut. Berbagai kebijakan itu dituangkan pemerintah dalam peraturan-peraturan yang mengikat para eks tapol PKI.

¹⁰ Justus M. van der Kroef, "Indonesia's Political Prisoners," *Pacific Affairs*, 1976 <<https://doi.org/10.2307/2756672>>.

¹¹ Robert Cribb dan Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, second edi (Oxford: The Scarecrow Press, Inc., 2004), hal. 423.

¹² Goffrey B. Robinson, *Musim Menjagal; Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2018), hal. 345

¹³ *Tahun-Tahun Yang Tak Pernah Berakhir; Memahami Pengalaman Korban 65 - Esai-Esai Sejarah Lisan*, ed. John Roosa, Hilmar Farid, and Ayu Ratih (Jakarta: ELSAM, 2004), hal. 17.

Orde Baru berusaha untuk mengawasi dan membina orang-orang PKI itu agar menanggalkan paham komunisnya dan menjadi seorang pancasilais. Setelah serangkaian dominasi negara terhadap PKI di pertengahan dekade 1960-an, rezim lebih memilih untuk menggunakan hegemoni untuk memperlakukan para eks-tapol tersebut. Sebagai suatu kelompok yang tetap dicurigai memiliki potensi untuk membangkitkan komunis kembali, mereka selalu diawasi, baik melalui suprastruktur maupun infrastruktur negara.

Semenjak jatuhnya Orde Baru pada 1998, berbagai penelitian mengenai tema-tema yang berkaitan dengan peristiwa 1965 mulai banyak dilakukan. John Roosa menulis sejumlah tulisan mengenai peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta maupun pasca 1965.¹⁴ Hermawan Sulistyono menulis mengenai kekerasan massal yang terjadi di Jawa Tengah pada 1965-1966.¹⁵ Tulisan lain mengenai kekerasan massal 1965-1966 ditulis Jess Malvin yang melakukan penelitiannya di Aceh.¹⁶ John Roosa – bersama Hilmar Farid dan Ayu Ratih, melakukan penelitian sejarah lisan untuk merekonstruksi kehidupan korban kekerasan 1965.¹⁷ Kemudian menyusul buku-buku dan artikelnya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar terjadinya

¹⁴ John Roosa, *op.cit*, 2008a

¹⁵ Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Kediri-Jombang 1965-1966)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011)

¹⁶ Jess Malvin, "Mechanics of Mass Murder: A Case for Understanding the Indonesian Killings as Genocide," *Journal of Genocide Research*, 2017

¹⁷ John Roosa, Hilmar Farid dan Ayu, *op.cit*.

penculikan para jenderal pada 30 September 1965.¹⁸ Geoffrey Robinson berusaha untuk merangkum masalah ini, dimulai dari latar belakang, kejadian dampak dari Gerakan 30 September.¹⁹ Andrew Conroe menulis disertasi tentang ingatan keluarga para mantan tahanan politik PKI pada masa-masa setelah Orde Baru.²⁰ Lalu taufik ahmad menulis komunitas eks-tahanan politik di Mocongloe, Sulawesi Selatan.²¹ Karya-karya dari penulis kontemporer tersebut dapat melengkapi kepustakaan mengenai peristiwa sekitar 1965 yang telah ada sebelumnya yang muncul pada masa Orde Baru.

Untuk wilayah Sumatera Barat, terdapat disertasi Yenny Narny yang menulis tentang ketahanan para perempuan bekas korban kekerasan massal 1965-1966 di Sumatera Barat.²² selain itu, Annie Pohlman juga menulis sebuah artikel mengenai gambaran kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan pada periode yang sama.²³ Baik Yenny Narny maupun Annie Pohlman dalam tulisannya hanya berfokus pada studi gender dan perempuan dan korban. Dari uraian beberapa tulisan itu, dapat

¹⁸ Lihat John Roosa, "The Truths of Torture: Victims' Memories and State Histories in Indonesia," *Indonesia* 85. 2008b. John Roosa, "The State of Knowledge about an Open Secret: Indonesia's Mass Disappearances of 1965-66," *Journal of Asian Studies*, 2016,

¹⁹ Geoffrey Robinson, *op.cit*

²⁰ Andrew Conroe, 'Generating History Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia', (*Dissertation*; The University of Michigan), 2012.

²¹ Ahmad Taufik, "Eks-tapol dan Kontrol Pemerintah: Studi Pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003)," *Patanjala*, 5.3 (2013)

²² Yenny Narny, "Resilience of West Sumatran women: historical, cultural and social impacts" (*Disertasi*; Deakin University, 2016).

²³ Annie Pohlman, "Two Woman's Testimonies of Sexual Violence During the 1965-1966 Indonesian Massacres" dalam *The Indonesian Genocide of 1965; Causes, Dynamics and Legacies*, disunting Katherine McGregor, Jess Melvin dan Annie Pohlman, Switzerland; Palgrave Studies in the History of Genocide, 2017

dilihat bahwa penelitian mengenai kontrol negara atas kehidupan eks tahanan politik PKI pada masa-masa sesudah 1965 di Sumatera Barat masih sedikit.

Untuk melengkapi berbagai tulisan-tulisan itu, penelitian yang mengkaji tentang kontrol negara terhadap eks tahanan politik menjadi penting untuk menjelaskan mengenai alasan, pelaksanaan dan implikasinya. Subjek dari penelitian ini adalah Orde Baru yang –untuk mengontrol para eks tapol ini, mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal pengawasan dan pembinaan sebagai usahanya mencegah munculnya kembali Komunisme di Sumatera Barat secara khususnya dan Indonesia secara umumnya. Konteks politik dan sosial menjadi yang menjadi alasan dari muncul kebijakan itu menjadi fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini.

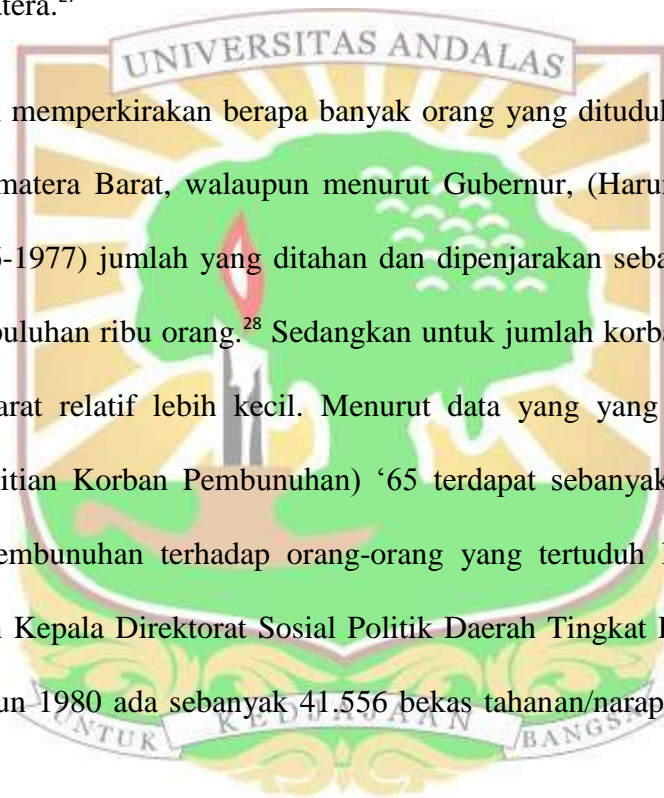
Meskipun tidak terlalu banyak terdengar tentang gerakan ini, ternyata anggota yang terdaftar PKI di provinsi Sumatera Barat cukuplah besar jumlahnya. Audrey Kahin mencatat pada bulan November 1965, diperkirakan ada sekitar 300.000-an anggota PKI di seluruh Sumatera. Berdasarkan Laporan Komisi Pencari Fakta untuk peristiwa 30 September 1965 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Mayor Jenderal Soemarno Sosroatmodjo, bahwa jumlah anggota PKI yang tobat 81.000 di Sumatera Utara dan 45.361 di Sumatera Barat.²⁴

Kajian ini juga menjadi menarik, karena selain jumlahnya yang mencapai puluhan ribu –provinsi ini dulunya menjadi basis dari partai-partai berhaluan Islam seperti

²⁴ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 383.

Masyumi dan Perti.²⁵ Masyumi dibubarkan setelah mendukung PRRI, dan menjadi pembuka jalan PKI untuk menyebarkan pengaruhnya di Sumatera Barat.²⁶ Pasca 1965, didapatkan data mengenai puluhan ribu orang yang ditangkap karena dicurigai mendukung PKI dan organisasi yang seasas dengannya. Dengan jumlah itu, Sumatera Barat tidak mengalami pembantaian dengan jumlah semassif yang dialami daerah lainnya di Sumatera.²⁷

Sukar untuk memperkirakan berapa banyak orang yang dituduh simpatisan yang terbunuh di Sumatera Barat, walaupun menurut Gubernur, (Harun Zain –menjabat dari tahun 1966-1977) jumlah yang ditahan dan dipenjarakan sebagai komunis atau simpatisannya puluhan ribu orang.²⁸ Sedangkan untuk jumlah korban yang terbunuh, di Sumatera Barat relatif lebih kecil. Menurut data yang yang dihimpun YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan) ‘65 terdapat sebanyak 187 orang yang tewas akibat pembunuhan terhadap orang-orang yang tertuduh PKI.²⁹ Sedangkan menurut catatan Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 1980 ada sebanyak 41.556 bekas tahanan/narapidana Gerakan 30



²⁵ Lihat Herb Feith, *The Indonesian Election of 1955*, Interm Report Series; Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971, hal 68.

²⁶ Lihat Mestika Zed, Edy Utama, dan Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1945-1995)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal.196

²⁷ Dengan tidak mengesampingkan kenyataan bahwa tetap terjadi kekerasan dan pembunuhan di Sumatera Barat pada periode 1965-66, wilayah ini menyakiskan ratusan kematian, lihat Narny, Yenny. "Violence in the Anti-Communist Tragedy in West Sumatera", *Tesis*. Australian National University, 2008, hal 57. Mengenai hal ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

²⁸ Mestika Zed, Edy Utama, dan Hasril Chaniago, *op.cit*, hal. 390.

²⁹ Sy. Datuk R.A., *Derita Sepahit Empedu Kehidupan Eks-Tapol 65 di Alam Minangkabau* (Bandung: Ultim, 2015), hal. 128.

September di Sumatera Barat.³⁰ Data ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak bekas tahanan politik di Sumatera Barat. Mereka ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Mereka yang ditangkap dan ditahan itu mayoritasnya adalah tahanan yang tergolong sebagai tahanan kelas C yang hanya pendukung PKI ataupun organisasi sayapnya. Mereka tersebar di berbagai berbagai daerah, dari kota hingga ke desa-desa. Menurut laporan Kepala Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat (1979), terdapat 40.971 orang tahanan golongan C di Sumatera Barat dan tahanan kelas B adalah sebanyak 2.278.³¹ Beberapa penjelasan di atas menjadi landasan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengawasan dan pembinaan Orde Baru terhadap eks tahanan politik PKI di Sumatera Barat pada tahun 1971-1998.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, studi ini akan membahas mengenai pengawasan dan pembinaan Orde Baru terhadap eks tahanan politik PKI di Sumatera Barat. dari latar belakang yang telah diuraikan, setelah dibebaskan para tahanan politik PKI ini tetap mendapat pengawasan dan pembinaan dari pemerintah (Orde Baru). Dari permasalahan pokok ini dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik di Sumatera Barat pada tahun 1971-1998?

³⁰ Petunjuk Pelaksanaan, Nomor : Juklak. 01 /Sospol/X/1982 tentang Pembinaan dan Pengawasan Serta Pencatatan dan Pelaporan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI di Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

³¹ *Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, "Informasi tentang berapa jumlah ex-tapol dan narapidana yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah Sumatera Barat dapat dilihat pada *Data-data terakhir jumlah ex Tahanan G.30.S/PKI gol. C.I dan B.-*," (Padang 1 Agustus 1979), hal. 1.

2. Apa kebijakan pemerintah Orde Baru (pusat) dan bagaimana pelaksanaan dari pengawasan dan pembinaan terhadap eks-tapol PKI di Sumatera Barat?
3. Apakah dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan itu terhadap kehidupan eks-tapol di Sumatera Barat?

Penelitian sejarah perlu dibatasi sesuai topik yang diteliti. Ruang lingkup kajian berguna untuk membantu peneliti agar pembahasannya tetap memiliki titik fokus dan tidak terjerumus dalam pembahasan yang terlalu luas. Adapun ruang lingkup dalam kajian dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut:

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat. Beberapa studi yang telah dilakukan mengenai hal seputar tragedi 1965 belum ada yang fokus membahas kontrol pemerintah terhadap eks-tapol di daerah ini. Studi tentang pengawasan dan pembinaan negara terhadap para eks-tapol di Sumatera Barat. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan komunisme juga dilarang untuk berkembang. Kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Ketika terjadi penghancuran terhadap PKI, di provinsi ini adalah sekitar 30.000-40.000 orang. Jika melihat dari sebaran jumlah eks-tapol di Pulau Sumatera, maka diketahui bahwa jumlahnya berada pada peringkat dua setelah Sumatera Utara dengan 120.000 orang.³² Selain itu, jumlah itu menjadi menarik mengingat

³² Meskipun berada dalam posisi kedua, Sumatera Barat mengalami pembunuhan yang relatif lebih kecil dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh tetapi –tanpa mengurangi arti jumlah korban tewas.

Sumatera Barat setelah sekian lama merupakan basis bagi organisasi Islam seperti Masyumi dan Perti. Sedangkan lingkup temporal dalam penelitian ini mencakup periode dari tahun 1971 sampai 1998. Tahun 1971 dipilih sebagai awal pelepasan para tahanan politik Gerakan 30 September oleh pemerintah di Indonesia. Tahun 1998 dipilih karena pada tahun itulah Soeharto dengan Orde Barunya turun sebagai penguasa di Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru untuk pembinaan dan pengawasan terhadap para eks-tapol PKI.
2. Menganalisis bagaimana pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan itu.
3. Menganalisis apa dampak dari diberlakukan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap kehidupan para eks-tapol PKI di Sumatera Barat.

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan negara terhadap eks tahanan politik yang berada di Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga bisa menambah kajian mengenai pola kontrol pemerintahan Orde

Untuk data-data korban tewas di dua provinsi itu lihat Geoffrey Robinson, *op.cit*, hal. 160-193. *Laporan keadaan perkembangan Napi/eks Napi dan eks Tahanan G30S di daerah Sumbagut untuk Triwulan III TA 1995/1996*, Jakarta, 1998.

Baru dalam menangani orang-orang yang merupakan mantan tahanan politik PKI di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini bisa juga digunakan untuk gambaran sebagai rekomendasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik bagi pemerintahan.

D. Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan membahas mengenai beberapa literatur terdahulu mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan Gerakan 30 September, Kekerasan 1965-1966 dan sesudahnya telah banyak dilakukan, baik itu oleh peneliti asing maupun peneliti Indonesia. Dengan mendiskusikan beberapa karya tersebut, maka diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai perbedaan dari karya-karya tersebut dengan fokus penelitian ini.

Samuel Gultom,³³ menulis tentang “kompilasi” peradilan-peradilan di zaman Orde Baru. Bab-bab dalam buku ini memperlihatkan secara empiris bagaimana lembaga peradilan bekerja membenarkan kekerasan negara. Baik dalam perkara subversi, kriminalisasi politik maupun perdata, hakim akan sampai pada putusan yang secara esensial berpihak pada kepentingan rezim dengan demikian membenarkan kekuasaan negara. Praktek pembenaran negara tidak dapat dipisahkan dari kekerasan negara. Ia akan tetap ada selama kekerasan masih menjadi pilihan menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kekerasan negara akan tetap menjadi pilihan cara dalam struktur kekuasaan yang dibangun berwatak. Rezim yang eksklusif

³³ Samuel Gultom, *Mengadili Korban; Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara* (Jakarta: ELSAM, 2003).

tidak bisa memiliki alternatif lain kecuali terus mendayagunakan instrumen-instrumen represif negara untuk menjaga kekuasaannya.

Lebih lanjut, instrumen represif berwujud peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibahas oleh Mudzayin, dalam bukunya *Dibebaskan Tanpa Kebebasan, Beragam Peraturan Diskriminatif yang melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966*, merangkum berbagai aturan yang ditujukan kepada para eks tahanan politik sebagai suatu proyek hegemoni negara.³⁴ Pada tahun 1979, para tahanan politik Gerakan 30 September dibebaskan secara besar-besaran. Dalam pada itu dinyatakan bahwa para tapol ini tidaklah berarti mendapatkan kebebasan. Berbagai aturan dikenakan kepada mereka berpuluh-puluh tahun kemudian, seperti wajib lapor terhadap para tapol baru dicabut pada tahun 1997. Itu berarti delapan belas tahun semenjak dibebaskan, mereka belumlah mendapat kebebasan yang sebenarnya. Dalam buku ini akan terlihat lewat kekuasaan penguasa memiliki segala sumber daya untuk merancang paradigma masyarakat yang salah satunya bisa lewat peraturan-peraturan. Penguasa dalam hal ini adalah negara, merumuskan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap eks tahanan politik. Mereka tidak dibiarkan bebas dalam masyarakat. Pandangan masyarakat dibuat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah secara persuasif. Cara-cara represif baru dilakukan apabila ada peraturan-peraturan

³⁴ Mudzayin, Mudzayin. *Dibebaskan Tanpa Kebebasan, Beragam Peraturan Diskriminatif yang melilit Tahanan Politik Tragedi 1965-1966*. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), 2008.

yang tidak dijalankan. Dalam hal ini, kekerasan dapat dilegitimasi oleh negara dengan alasan penegakan hukum (*law enforcement*).

Asvi Warman Adam menulis tentang bagaimana negara menerapkan dominasi dan hegemoni terhadap Gerakan 30 September.³⁵ Asvi menjelaskan bagaimana pengalaman para korban Gerakan 30 September, dimulai dari penangkapan, penahanan, perburuan, pembunuhan massal, pembuangan paksa (dominasi), hingga perlakuan diskriminatif dialami jutaan keluarga korban 1965 karena dicap tidak bersih lingkungan (hegemoni). Stigma sangat buruk kepada korban dan keluarganya yang mengakibatkan trauma dan penderitaan berkepanjangan harus segera ditepis agar tidak melekat sepanjang hayat. Dalam hal ini, negara menerapkan dominasi dan hegemoninya terhadap para korban. Pasca kekerasan massal 1965-1966, negara melekatkan stigma negatif terhadap para korban. Hal ini dilaksanakan dengan berbagai aturan-aturan yang membatasi kehidupan para korban dengan alasan mereka patut diwaspadai karena memiliki hubungan Gerakan 30 September.

Untuk melihat bagaimana hegemoni itu berdampak kepada masyarakat, John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid,³⁶ mewawancarai beberapa narasumber dari eks-tapol dan keluarga mereka untuk mengumpulkan cerita-cerita biografi kolektif dari orang yang memiliki pengalaman serupa dalam perjalanan hidupnya (masa pra-1965, penangkapan, interogasi, penahanan, pembebasan, dan kehidupan di luar penjara).

³⁵ Asvi Warman Adam, *Melawan Lupa, Menepis Stigma Setelah Prahara 1965* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

³⁶ John Roosa, Farid, dan Ratih, *op.cit.*

Metode penelitian dalam buku ini adalah sejarah lisan. Artinya narasi buku ini dibangun atas wawancara terhadap para korban. Hasil dari penelitian dalam buku ini adalah kebanyakan korban ingin menentang ingatan sosial yang menganggap mereka sebagai setan dan penghianat. Para narasumber menolak hegemoni negara, dalam hal ini adalah narasi yang menyebutkan mereka sebagai pemberontak dan penghianat.

Andrew Marc Conroe, *Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia*.³⁷ Dalam disertasinya ini, Marc Conroe membuat sebuah kategori sosial yang ia namakan “anak-PKI”. Kategori dari individu bisa jadi dan sering pula disamakan dengan orang tua komunis mereka yang difitnah dan dibenci. Mereka menjadi korban dari Orde Baru karena stigma yang diberikan kepada orang tua mereka yang PKI turut pula diberikan kepada anak-anaknya. Melihat pada 1965 dan setelahnya dari perspektif umum untuk permasalahan anak PKI ini, asumsi dari penulis adalah; 1) diskursus Orde Baru bersifat monolitik dan tidak terdiferensiasi, 2) pemberian pembebasan, ketidakadilan dan distorsi sejarah dilakukan di bawah Orde Baru bisa secara sederhana dan sistematis dibatalkan melalui pelurusan sejarah. Stigma anak-PKI ini muncul akibat hegemoni negara terhadap keturunan PKI.

³⁷Andrew Marc Conroe, *Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia*, (*Disertasi*, University of Michigan, 2012)

Indonesia's Political Prisoners oleh J. M van der Kroef,³⁸ membahas mengenai tahanan politik di Indonesia. Setelah terjadinya pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap anggota PKI dan mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Van der Kroef menyebutkan jumlah total mereka yang tertangkap itu setidaknya adalah 580.000 orang. Sebagian mereka telah dilepaskan pada awal tahun 1970-an tetapi beberapa yang dianggap sebagai komunis garis keras tetap ditahan hingga beberapa tahun selanjutnya. Pulau Buru menjadi tempat pembuangan para PKI garis keras ini. Sebanyak 12.000 orang dibuang ke pulau itu. Prinsip penangkapan tanpa pengadilan menjadi kebijakan Indonesia terhadap permasalahan '65. Posisi Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadi alasannya untuk tidak mengubah pendekatannya untuk kontrol politik dengan penangkapan dan pemenjaraan yang tidak terbatas. Hal ini bukanlah solusi yang nyata bagi permasalahan tahanan politik. Juga bukan akhir dari praktek atas esensi penangkapan politik di masa depan. Di sini kita dapat melihat praktek dominasi negara terhadap orang-orang PKI atau organisasi yang seasas dengannya. Artikel ini masih memberikan fokus dalam skala nasional secara makro, namun akan berguna untuk memberikan pemahaman terhadap dasar awal dalam kajian mengenai tahanan politik PKI di Indonesia.

³⁸ Justus Van der Kroef, *op.cit.*

Taufik Ahmad,³⁹ Menulis kontrol pemerintah dan politik resistensi tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca pembebasan pada komunitas tahanan politik di Moncongloe di Sulawesi Selatan. Pembebasan tapol mengakibatkan politik pengontrolan negara terhadap tapol berubah dari kontrol fisik ke kontrol sosial terhadap komunitas tapol di tengah lingkungan masyarakat. Untuk memperkuat hegemoninya, pemerintah mengeluarkan berbagai ketentuan yang membatasi dan mengontrol secara efektif ruang gerak eks-tapol. Kontrol sosial negara tersebut mengarah pada pembentukan identitas para tapol sebagai komunitas tidak bersih lingkungan, sehingga ruang eks-tapol untuk mengembangkan dirinya tertutup di setiap bidang kehidupan. Identitas tapol kemudian menjadi stigma yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar sehingga melahirkan kebencian dan ketakutan terhadap tapol itu sendiri. Stigma terhadap tapol tersebut menjalar sampai anak cucu mereka sehingga melahirkan suatu bentuk pengasingan baru di tengah lingkungan masyarakat. pengasingan ini mengakibatkan hilangnya hak-hak sipil dan politik, jauh lebih menyiksa daripada pengasingan di kamp pengasingan yang terisolasi. Untuk bertahan di tengah aruh stigma itu, eks-tapol kadang berkamufase, menyembunyikan identitas dengan merubah nama, dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Secara umum kajian Taufik di Sulawesi Selatan memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

³⁹ Ahmad Taufik, *op.cit.*

Dari paparan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai eks tahanan politik memang telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun masih sedikit yang memilih Sumatera Barat sebagai fokus dari penelitiannya. Yenny Narny,⁴⁰ menulis pengalaman perempuan di Sumatera Barat yang terdampak akibat peristiwa 1965. Dengan menggunakan pendekatan narasi etnografi, studi ini berusaha untuk memperoleh pemahaman atas pengalaman mereka sebagai basis atas analisis terhadap strategi dan pilihan-pilihan yang mereka ambil untuk pemulihan. Dalam kajian ini didapatkan kesimpulan bahwa perempuan-perempuan yang diteliti mampu untuk memulihkan diri dengan menarik diri dari lingkungan dan menggunakan kekuatan kebudayaan tradisional Minangkabau. Kebudayaan Minangkabau yang menganut matrilineal dan bersifat unik di Indonesia, menyediakan tempat bagi para perempuan, sebagai pengambil keputusan utama bagi keluarga memberikan mereka hak yang tidak dapat disangkal terhadap aset keluarga. Selain itu, perempuan mampu menggunakan kepercayaan terhadap agama untuk membantu pemulihan dan berpartisipasi dalam bidang-bidang ekonomi yang disediakan oleh sistem tradisional. Dalam disertasinya, Yenny Narny berusaha menempatkan fokus pada korban sebagai objek dan lebih tertuju pada penelitian gender. Narny lebih melihat bagaimana para korban, terutama perempuan, yang terdampak akibat kekerasan massal pada 1965-1966 untuk bisa bangkit.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai eks tapol dalam skala nasional ataupun di daerah lain telah mulai

⁴⁰ Yenny Narny, *op.cit*

dilakukan oleh para penulis ataupun akademisi. Namun, masih sedikit yang mengkaji mengenai tema itu dalam konteks Sumatera Barat. Maka, penelitian itu berusaha untuk melengkapi kajian-kajian yang sudah ada dan memberikan sumbangan berarti bagi penulisan sejarah tentang eks tahanan politik di Indonesia.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan konsep dominasi dan hegemoni oleh Gramsci. Di sini, hegemoni dipahami berbeda dengan konsep dominasi: monopoli negara terhadap cara-cara kekerasan dan menjadi peran konsekuen sebagai pemecahan terakhir semua bentuk perselisihan”. Hegemoni adalah sebuah proses yang melalui mekanisme konsensus ketimbang melakukan penindasan terhadap kelas sosial lainnya.⁴¹ Hegemoni juga dapat dipahami sebagai sebuah kualitas yang mewakili “kesadaran kelas”. Kelas di sini tidak hanya dipahami secara ekonomis tetapi juga merujuk pada kesadaran intelektual dan moral, sebuah budaya yang sama.⁴² Ada beberapa cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada dalam masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Pada model yang dikembangkan Gramsci tentang dominasi dan hegemoni, terdapat kelas yang menguasai kelas yang lain.⁴³ Kelompok yang menguasai, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelas yang

⁴¹ Walter. L. Adamson, *Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*, (Barkeley; University California Press, 1980), hal 170

⁴² *Ibid*, hal. 171

⁴³ Ndah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci”, *Translitera Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 2008, hal 23

dibawahnya, namun memiliki kuasa menentukan terhadap kelas yang berada dibawahnya karena akses mereka terhadap kekuasaan. Gramsci berargumen bahwa negara yang lemah yang selalu bergantung pada penggunaan kekerasan sedangkan negara yang telah kuat akan memerintah secara eksklusif melalui hegemoni.⁴⁴

Dalam perbincangan tentang hegemoni, muncul sebuah konsep negara integral. Negara integral adalah negara yang memiliki dominasi dan hegemoni yang kuat. Negara integral merupakan hegemoni yang dilapisi dengan selubung berupa kekuasaan koersi hegemoni, sekalipun bekerja pada tingkat kesadaran namun dia selalu didampingi oleh langkah koersi.⁴⁵ Negara integral memiliki alat-alat kekuasaan (*means of coercion*) dan alat penegak kepemimpinan hegemonis (*means of establishing hegemonic leadership*) seperti pendidikan, agama, media, penerbitan dan lain-lain. Alat kekerasan terdiri dari alat-alat paksa dan represif negara sementara alat pendirian kepemimpinan hegemonis merujuk pada institusi dalam formasi sosial yang bukan bagian dari proses produksi ekonomi material juga bukan bagian dari organisasi negara.⁴⁶

Konsep hegemoni Gramsci dilihat melalui penjelasannya tentang basis dan supremasi kelas yang menunjukkan bahwa suatu kelompok dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelompok-kelompok sosial di bawahnya dengan

⁴⁴ Walter. L. Adamson, *op.c.*, hal 170

⁴⁵ Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 134

⁴⁶ *Ibid*, hal. 144

dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi.⁴⁷ Cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh aparaturnegara seperti polisi, tentara dan hakim, sedangkan hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai kelas atau masyarakat di bawahnya.

Maka setelah kekuasaannya diraih dan telah mapan, pemerintah menggunakan hegemoni yang menekankan pada intelektual dan moral. Hal ini akan mengakibatkan cara berpikir masyarakat akan ditentukan oleh penguasa. Hegemoni dilakukan secara persuasif. Kontrol internal berdasarkan hegemoni merujuk pada moral sosial umum dan bahasa yang dipakai. Lebih jauh superioritas ideologi ini harus memiliki akar ekonomi yang kuat, 'jika hegemoni adalah *ethico-political*, ia harus bernilai ekonomi.⁴⁸ Secara berangsur-angsur pandangan masyarakat akan ditentukan oleh penguasa. Intinya adalah bagaimana nilai-nilai dalam suatu kelompok itu diperkenalkan untuk dijalankan oleh kelompok lain. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh suatu kelompok, –dalam konteks penelitian ini adalah rezim Orde Baru, dapat berupa ideologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ada tiga cara untuk membentuk gagasan dalam perjuangan hegemoni, yaitu bahasa, pendapat umum dan folklor. Bahasa merupakan cara utama untuk penyebaran ideologi.

⁴⁷ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 19.

⁴⁸ Joseph V. Femia, *Gramsci's Political Thought; Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*, Oxford; Clarendon Press, 1981, hal 24

Pendapat umum yang bersifat kolektif menjadi sarana ampuh untuk membangun ideologi dan berfungsi melawan ideologi. Folklor (termasuk sejarah pengetahuan masyarakat) menjadi sarana penopang hegemoni yang berfungsi untuk mengikat masyarakat tanpa kekerasan.⁴⁹

Selanjutnya, Orde Baru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istilah yang merujuk pada masa kepemimpinan Soeharto di Indonesia yang dimulai semenjak 1966 dan berakhir pada 1998. Soeharto menciptakan Orde Baru Indonesia untuk membedakannya dengan masa-masa 'orde lama' Sukarno.⁵⁰ Peter Kasenda memberikan kesimpulan mengenai Indonesia dibawah rezim Orde Baru memiliki misi fundamental pembangunan ekonomi dengan membentuk tim teknokrat yang berhasil menstabilkan perekonomian. Menurutnya, rezim ini (Orde Baru) mengalami pertumbuhan ekonomi maju pesat, tapi pada saat yang sama adalah salah satu negara terkorup di dunia.⁵¹ Selain itu, John Roosa berargumen bahwa rezim Soeharto (Orde Baru) tidak dapat membiarkan komunisme mati, karena itu ia menetapkan dirinya dalam hubungan dialektis dengan komunis, atau lebih tepat, dengan citra khayali 'komunisme'.⁵²

Sebagai rezim yang memerintah, Orde Baru memiliki kekuasaan untuk menjalankan program-programnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau

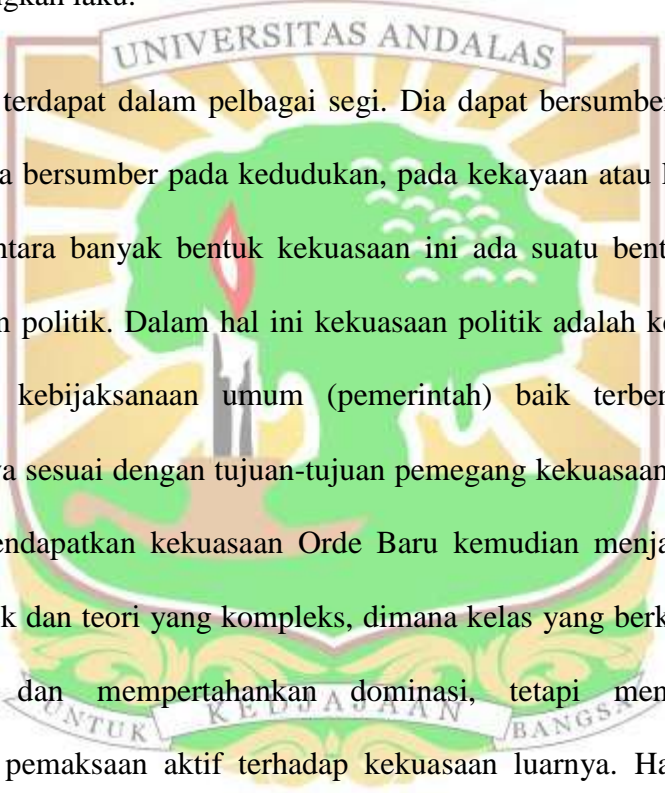
⁴⁹ I Nyoman Kuta Ratna, *Sastra dan Cultural Studies, Representasi Fiksi dan Sastra*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007, hal 183-194

⁵⁰ Ricklefs, *op.cit*, hal. 361.

⁵¹ Peter Kasenda, *op.cit*, hal. 240

⁵² John Roosa, *op.cit*, 14-15. Lihat juga Ariel Heryanto, *op.cit*, hal 151

sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah-tingkah lakunya seorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.⁵³ Charles F. Andrain mengemukakan kekuasaan adalah penggunaan sejumlah besar daya (aset atau kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain dengan adanya penyesuaian tingkah laku.⁵⁴



Kekuasaan terdapat dalam pelbagai segi. Dia dapat bersumber pada kekerasan fisik, dapat juga bersumber pada kedudukan, pada kekayaan atau kepercayaan dan lain-lain. Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.⁵⁵ Ketika suatu kelas mendapatkan kekuasaan Orde Baru kemudian menjalankan sejumlah aktivitas praktek dan teori yang kompleks, dimana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuasaan luarnya. Hal ini dinamakan dengan wewenang. Kekuasaan, wewenang dan legitimasi merupakan terminologi

⁵³ Miriam Budiardjo (ed.) *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta; Penerbit Sinar Harapan, 1984), hal. 9

⁵⁴ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1992), hal. 130

⁵⁵ Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1973), hal. 35-37

yang susah untuk dipisahkan.⁵⁶ Pada hakikatnya, kewenangan merupakan kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Hal yang membedakan di antara kekuasaan dan kewenangan adalah keabsahannya.⁵⁷ Sedangkan legitimasi menyangkut keyakinan moral yang membenarkan hak untuk memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki.⁵⁸ Mereka yang dapat memberikan legitimasi terhadap kewenangan seseorang adalah masyarakat. Mereka yang memerintah tidak dapat memberikan legitimasi atas wewenang yang dimilikinya sendiri. Maka, pihak yang memerintah sering melakukan usaha untuk meyakinkan anggota masyarakat bahwa wewenang untuk memerintah yang dimilikinya adalah sah dan secara moral, mereka dapat menerapkan kewenangan tersebut.⁵⁹

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat terhadap mereka yang terlibat Gerakan 30 September beserta keluarganya dengan cara mendekati, mengajak, merangkul dan membimbing ke arah jalan yang benar dengan tujuan untuk menyadarkan mereka agar secara sadar meninggalkan dan menanggalkan ideologi komunis menjadi insan Pancasila.⁶⁰

⁵⁶ Haryanto, *Elit, Massa dan Kekuasaan: Satu Bahan Pengantar*, (Bulaksumur; Penerbit PolGov, 2017), Hal. 54

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 55

⁵⁸ Charles F. Andrain, *op.cit*, hal. 203

⁵⁹ Haryanto, *op.cit*, Hal 59

⁶⁰ Direktorat Jendral Sosial Politik, *Pedoman Teknis tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S/PKI*, Jakarta, 24 September 1982, hal 9

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap usaha dan kegiatan yang berencana dan terarah yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan masyarakat terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana Gerakan 30 September, meliputi; mengamati, mengikuti, mencegah perilaku para bekas tahanan dan bekas narapidana Gerakan 30 September agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak dipengaruhi/diperalat sisa Gerakan 30 September dan unsur-unsur subversif lainnya dalam usaha membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia atau paham komunis di Indonesia.⁶¹

F. Metode dan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu sekumpulan aturan dalam usaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menganalisis secara kritis dan kemudian menyajikannya dalam tulisan sejarah. metode sejarah bertumpu pada empat langkah pokok, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi (bukti) sejarah.⁶² Data berupa arsip yang dikumpulkan berhubungan dengan politik Orde Baru terhadap mantan kaum komunis di Sumatera Barat. Sumber-sumber sejarah tersebut dibagi menjadi dua

⁶¹ *Ibid*, Hal. 10

⁶² Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 86.

jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan politik Orde Baru terhadap mantan kaum komunis di Sumatera Barat. Arsip-arsip tersebut telah ditemukan beberapa di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat. Arsip-arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah laporan-laporan Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban (Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat mengenai bekas tahanan dan narapidana G-30-S/PKI, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk Teknis (Juknis) Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat pengawasan dan pembinaan terhadap bekas tahanan dan narapidana G-30-S/PKI.

Selain sumber-sumber tertulis, dan untuk mengimbangi arsip-arsip pemerintah, maka akan diusahakan melakukan beberapa wawancara lisan. Untuk melengkapi sumber dari penelitian ini maka akan diusahakan untuk mencari sumber-sumber lisan berupa kesaksian pelaku sejarah atau orang yang hidup sezaman. Demi keperluan ini penulis menjalin komunikasi dengan YPKP '65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan '65) Cabang Sumatera Barat yang berkedudukan di Bukittinggi. Yayasan ini dipimpin oleh Nadiana (60), dan dari beliau didapatkan hubungan dengan korban-korban 65 yang telah ditelitinya.

Ingatan-ingatan kolektif mengenai kehidupan para eks tahanan politik PKI di Sumatera Barat itu akan berguna untuk menganalisis penerapan kebijakan

pemerintah terhadap mereka.⁶³ Maurice Halbwachs mengingatkan bahwa keperluan menulis sejarah sebuah periode, masyarakat atau bahkan seseorang hanya muncul ketika subyek itu telah jauh dibelakang untuk bisa diambil testimoninya oleh mereka yang ingin melestarikan ingatan itu. Ingatan-ingatan itu bisa saja tersebar di berbagai orang-orang secara terpisah. Ketika itu terjadi, cara untuk melestarikan ingatan-ingatan itu adalah dengan menuliskannya, karena tulisan akan tetap hidup meskipun pemikiran dan kata-kata mati.⁶⁴ Secara umum, kajian mengenai memori ini dianggap mengubah kita melihat waktu dan interelasi atas masa lalu, masa kini dan masa depan.⁶⁵

Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang memberikan keterangan yang sifatnya mendukung data sumber. Sumber-sumber ini bisa berupa buku-buku teks, dan artikel ilmiah yang mengandung informasi mengenai politik Orde Baru terhadap komunisme. Karya-karya itu didapatkan dengan studi pustaka dilakukan di beberapa pustaka seperti Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Ruang Baca Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat UNP dan Jurusan Sejarah UNP serta Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain mengunjungi berbagai

⁶³ Ingatan sosial sama dengan 'ingatan kolektif'. Tekanan dari kedua istilah ini adalah gagasan bahwa ingatan seseorang disusun oleh identitas kelompok. John Roosa, Hilmar Farid, Ayu Ratih, *op.cit*, hal 10.

⁶⁴ Maurice Halbwachs, *The Collective Memory*, (New York; Harper & Row Colophon Books, 1980), Hal 79

⁶⁵ Marek Tamm, 'Beyond Memory and History; New Perspective on Memory Studies, *History Compass* 11/6 (2013), hal 466

perpustakaan itu, beberapa sumber sekunder ini juga bisa dari laman-laman seperti ecommons.cornell/handle untuk mendapatkan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema tesis in yang pernah dimuat dalam Jurnal Indonesia (Cornell) dan laman genocidapolitic.blogspot.com yang memandu penulis kepada laman-laman yang berisi tentang artikel, skripsi, tesis elektronik dengan tema yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah mendapatkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah tahap pengujian sumber. Kritik dibagi dua, pertama kritik ekstern yang digunakan untuk mengetahui keaslian sebuah sumber. Untuk memastikan bahwa sumber itu asli, sumber yang digunakan harus merupakan sumber yang dikehendaki, sumber hasil asli atau tidak turunan dan harus utuh. Kedua, kritik intern, yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah kredibilitas atau kebenaran sumber. Caranya adalah sumber yang telah didapatkan kemudian dibandingkan dengan sumber yang lain sehingga diharapkan didapatkan sumber yang dapat dipercaya.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Peneliti menghimpun informasi suatu periode sejarah yang diteliti dengan menelaah setiap sumber-sumber yang telah didapatkan. Berdasarkan keterangan itu dapat disusun fakta-fakta sejarah. Kemudian fakta itu diseleksi, dianalisis dan disintesis dalam urutan kronologi dan dalam konteks hubungan kausalitas.

Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui kritik sumber dengan mencari dan menyusun hubungan antar fakta-fakta yang relevan, kemudian disusun secara kronologis dalam hubungan sebab-akibat yang dianalisis menggunakan konsep-konsep ilmu sosial dan sejarah.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan suatu kegiatan penulisan hasil penelitian sejarah secara deskriptif-analitis, berdasarkan sistematika dan kronologis. Ini adalah tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah, dimana sumber-sumber yang telah dikumpulkan, diseleksi dipahami lalu dituangkan dalam bentuk tulisan yang ilmiah. Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan merupakan suatu cara yang utama untuk memahami sejarah.

G. Sistematika Penulisan

Tesis terbagi atas enam bab. Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tinjauan dan manfaat penelitian, kerangka analisis, metode dan sumber, dan sistematika penulisan. Bab II membahas bagaimana Soeharto dan AD menciptakan Orde Baru dimulai dengan penjabaran peristiwa Gerakan 30 September secara singkat lalu bagaimana peristiwa ini menjadi batu loncatan Soeharto dan Angkatan Darat untuk berkuasa. Dalam bab ini juga dibahas tentang bagaimana penghancuran PKI di Indonesia dan Sumatera Barat. Terakhir adalah tentang bagaimana AD dan Soeharto menciptakan

Orde Baru dan Sumatera Barat pada masa Orde Baru. Bab III membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan pemerintah terhadap eks tahanan politik di Sumatera Barat dimulai dari situasi provinsi ini pada masa Orde Baru. Bab IV membicarakan mengenai narasi kehidupan beberapa orang eks tahanan politik PKI di Sumatera Barat. Bab V merupakan kesimpulan.

